

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketenagakerjaan menjadi isu bisnis dan perekonomian di Indonesia yang penting, karena tingginya jumlah pengangguran menunjukkan ketidakstabilan ekonomi dan kesulitan bagi individu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (Suharnanik. 2023, hlm.8). Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan pengangguran sebagai penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, mereka yang tidak bekerja dan sedang mempersiapkan diri untuk berusaha, serta penduduk yang tidak bekerja, tidak sedang mencari pekerjaan, dan didefinisikan sebagai mereka yang akan bekerja. bekerja. karena merasa tidak mungkin menjangkau mereka yang sudah mempunyai pekerjaan namun belum mulai bekerja, maka kata pengangguran disebut dengan pengangguran terbuka.

Beberapa aspek penyebab pengangguran terbuka yakni minimnya ilmu serta Keterampilan bagi pencari kerja yang dibutuhkan oleh organisasi dan dunia usaha. Semakin kompetitifnya dunia kerja, maka semakin banyak pula kebutuhan masyarakat untuk membekali diri dengan keterampilan dan kemampuan agar dapat bersaing dengan orang lain. Dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu membangun jaringan kerja yang kokoh, bekerja sama dalam tim yang kuat, serta memiliki komitmen tinggi terhadap kualitas kerja. Selain itu, mereka juga harus memiliki kecenderungan untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kualitas diri.

Pendidikan merupakan upaya untuk menjamin sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan terampil. Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari segi keterampilan, sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menyatakan bahwa pendidikan bangsa berfungsi untuk mengembangkan keterampilan dan menciptakan watak dan dunia manusia yang bertanggung jawab demi kemajuan bangsa. Tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan peserta didik menjadi manusia yang religius, beriman kepada Tuhan Yang Maha

Esa, manusia yang tinggi, sehat, cerdas, kuat, kreatif, warga negara yang mandiri, demokratis, dan berwibawa.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki peran penting dalam Sistem Pendidikan Nasional. Kegiatan sekolah menengah sangat penting bagi penyiapan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), baik fisik maupun mental. Sekolah kejuruan adalah sekolah menengah yang mempersiapkan siswanya untuk mempersiapkan pekerjaan di bidang tertentu. Menurut Undang-Undang Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 Bab 26 yang mengubah Undang-Undang Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, tujuan utama lulusan sekolah teknik dan lulusan sekolah kejuruan adalah: (1) mempersiapkan peserta didik menjadi anggota sejati masyarakat dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. dan bermartabat; (2) membina manusia berdasarkan sila Pancasila; dan (3) mengembangkan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan siswa agar mandiri dan menempuh pendidikan sesuai dengan tujuan akademiknya.

Oleh karena itu, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dirancang untuk mendidik dan mempersiapkan calon pekerja tingkat menengah agar siap memasuki dan menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri (DUDI) (Rakhman & Trihantoyo, 2020. hlm 200). Harapan tersebut tampaknya belum terwujud, mengingat masih banyaknya siswa yang belum memasuki dunia kerja. Hal ini terlihat dari informasi pengangguran terbuka (TPT) berdasarkan jenjang pendidikan tertinggi yang diselesaikan di Jawa Barat.

Tabel 1. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Barat Tahun 2019-2020

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Barat (Persen)			
	Februari		Agustus	
	2019	2020	2019	2020
SMK	13,36	11,33	14,63	18,75
Diploma I/II/III	9,02	10,98	7,48	9,85
SMP	17,77	9,37	8,45	10,70
SMA	16,79	8,93	10,96	13,73
Universitas	3,18	6,25	6,84	10,19
SD ke Bawah	39,89	4,97	4,28	5,68
Sumber : BPS, Sakernas				

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 1. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Barat Tahun 2021-2022

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Barat (Persen)					
	Februari			Agustus		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
SMK	14,87	11,16	12,75	16,71	14,63	-
SMA	12,82	10,77	10,60	13,51	12,18	-
SMP	9,10	10,03	7,57	9,53	8,22	-
Universitas	8,43	7,38	7,58	7,21	5,71	-
Diploma I/II/III	5,24	6,15	6,37	6,38	5,45	-
SD ke Bawah	4,56	5,83	5,32	6,07	4,69	-
Sumber : BPS, Sakernas						

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari data yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui TPT kelompok lulusan SMK pada Februari dan Agustus 2019-2022 masih rendah dibandingkan dengan lulusan pendidikan lainnya. Hal ini menunjukkan kurang optimalnya keterserapan kerja atau penyaluran lulusan SMK yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara tujuan dan hasil yang didapatkan dari pendidikan kejuruan.

Kota Cimahi menduduki peringkat pertama dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi di Jawa Barat tahun 2023 yaitu sebesar 10,52 persen atau sebanyak 33.192 jiwa. Pada dasarnya angka tersebut telah mengalami penurunan dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yakni pada tahun 2022, TPT mencapai 10,77 persen, sedangkan pada tahun 2021, angka tersebut mencapai 13,07 persen.

Dilansir dari limawaktu.id ditanggal 01 Desember 2023, usai membuka *Job Fair 2023*, Sekda Kota Cimahi Dikdik S Nugrahawan mengungkapkan bahwa banyak hambatan dalam penanganan pengangguran mulai dari kompetensi belum memenuhi kebutuhan perusahaan, terbatasnya lapangan kerja karena banyaknya

perusahaan yang berhenti beroperasi akibat pandemi, serta kurangnya akses masyarakat terhadap informasi pasar kerja (Munawar, Bubun. 2023). Salah satu solusi untuk mengatasi masalah pengangguran, khususnya di tingkat SMK adalah dengan mengembangkan lembaga ketenagakerjaan dalam dunia pendidikan melalui Bursa Kerja Khusus (BKK).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga kerja, Bursa Kerja Khusus (BKK) adalah satuan pelayanan pada lembaga sekolah menengah, lembaga pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang memfasilitasi penempatan tenaga kerja bagi lulusannya. BKK juga merupakan lembaga yang dibentuk sebagai mitra Dinas Ketenagakerjaan untuk memberikan informasi dan layanan kerja, mengelola pemasaran, distribusi, dan penempatan tenaga kerja (Direktorat Pembinaan, 2018).

Pada umumnya, BKK sebagai organisasi publik yang didirikan di satuan pendidikan memiliki beberapa fungsi utama, yaitu: menghubungkan lulusan dan Dunia Usaha/Industri yang membutuhkan karyawan; memperkuat hubungan antara SMK dan Dunia Usaha/Industri; memberikan layanan bimbingan bagi siswa yang masih belajar atau sudah lulus; memperluas pengetahuan peserta didik/lulusan SMK mengenai peluang kerja di dunia usaha/industri; serta menjadi wadah untuk menampilkan prestasi SMK dalam penempatan lulusannya di dunia kerja.

Mengacu pada tingginya tingkat pengangguran di Kota Cimahi selama tiga tahun terakhir yang didominasi oleh lulusan SMK, BKK di setiap SMK di Kota Cimahi memiliki peran penting dalam memasarkan lulusannya ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) sehingga dapat membantu mengurangi angka pengangguran. Pengelolaan BKK SMK yang optimal akan memberikan manfaat positif baik bagi peserta didik maupun alumni. Hal ini sejalan dengan visi dan misi organisasi BKK untuk menjadi lembaga pelayanan yang berkualitas, menjembatani lulusan dengan pemberi kerja, serta mempersiapkan SDM lulusan dengan kemampuan dan keterampilan yang unggul untuk menghadapi dunia kerja. Selain itu, BKK bertujuan untuk memperluas kerjasama dan meningkatkan jumlah lulusan SMK yang terserap ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Melihat urgensi tersebut perlu diadakannya penelitian untuk mengetahui kinerja BKK. Penilaian kinerja adalah aspek penting yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan atau organisasi untuk menilai keberhasilan strategi yang diterapkan. Penilaian kinerja menjadi salah satu faktor utama bagi organisasi karena hasil evaluasi kinerja dapat dijadikan bahan evaluasi dan indikator untuk memantau efektivitas strategi kinerja yang diterapkan oleh suatu organisasi (Anggraini, A. M, dkk. 2020, hml 59). Bagi organisasi sektor publik seperti BKK, penilaian kinerja adalah aktivitas yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana organisasi berhasil mencapai misinya. Informasi kinerja penting untuk menilai sejauh mana layanan yang diberikan suatu organisasi dapat memenuhi harapan dan kepuasan pengguna layanan Melalui evaluasi kinerja, upaya perbaikan dapat dilakukan secara bermakna dan sistematis.

Penting untuk mengetahui kinerja BKK SMK dalam memberikan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir kepada siswa serta alumni, guna mengatasi masalah keterserapan lulusan yang masih belum mencapai target yang ditetapkan. Sebagaimana penelitian-penelitian berikut: Penelitian oleh Nur Fitriana dan Sri Wibawani (2022, hlm 9) tentang Pengukuran Kinerja Bursa Kerja Khusus Sekolah Menengah Kejuruan dalam Meningkatkan Keterserapan Lulusan di Dunia Kerja terlihat bahwa sebagian besar hasil BKK SMK Sidoarjo berada pada kategori baik dan cukup baik. Kemudian penelitian oleh Widi Kisniantoro, *dkk* (2019, hlm 70) yang berjudul “Evaluasi Kinerja Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK PGRI 1 Surakarta Dengan Menggunakan Model CIPP” menghasilkan pembahasan mengenai pengelolaan BKK PGRI 1 Surakarta yang cukup mendukung dalam upaya mempersiapkan siswa atau alumni untuk bekerja di perusahaan. Kedua penelitian tersebut merupakan penelitian evaluasi manajemen pelayanan BKK SMK sebagaimana relevan dengan topik pada penelitian ini.

Terdapat tiga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri yang ada di kota Cimahi yaitu SMKN 1 Cimahi yang memiliki 9 program keahlian. SMKN 2 Cimahi yang memiliki 6 program keahlian dan SMKN 3 Cimahi yang memiliki 5 konsentrasi keahlian. Masing-masing SMK memiliki Bursa Kerja Khusus (BKK) untuk memberikan layanan kepada siswa dan alumni.

Berdasarkan informasi di atas, penulis ingin melakukan penelitian untuk mengevaluasi kinerja Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK Negeri Kota Cimahi. Penelitian ini diuraikan dalam skripsi dengan judul **“Kinerja Bursa Kerja Khusus dalam Menyalurkan Lulusan SMK Negeri di Kota Cimahi.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis mengidentifikasi permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu seberapa efektif kinerja Bursa Kerja Khusus (BKK) dalam menyalurkan lulusan SMK Negeri di Kota Cimahi. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait isu ini, penulis merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana gambaran pelaksanaan Bursa Kerja Khusus di SMK Negeri di Kota Cimahi?
2. Bagaimana gambaran kinerja Bursa Kerja Khusus Dalam Menyalurkan Lulusan SMK Negeri di Kota Cimahi?
3. Apa Faktor Penghambat dan Pendukung Kinerja Bursa Kerja Khusus Dalam Menyalurkan Lulusan SMK Negeri di Kota Cimahi?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kinerja Bursa Kerja Khusus (BKK) dalam menyalurkan lulusan SMK Negeri di Kota Cimahi.

1.3.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tergambarnya pelaksanaan Bursa Kerja Khusus di SMK Negeri di Kota Cimahi;
2. Tergambarnya kinerja Bursa Kerja Khusus Dalam Menyalurkan Lulusan SMK Negeri di Kota Cimahi;
3. Tergambarnya faktor penghambat dan pendukung kinerja Bursa Kerja Khusus Dalam Menyalurkan Lulusan SMK Negeri di Kota Cimahi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teori maupun praktek. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya wawasan terkait konsep kinerja Bursa Kerja Khusus (BKK). Sehingga diharapkan dapat menjadi bahan referensi terhadap penelitian selanjutnya tentang kinerja Bursa Kerja Khusus SMK.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini akan memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu serta wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai kinerja, pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) dan keterserapan kerja lulusan/penyaluran lulusan.
2. Bagi Sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada sekolah dalam meningkatkan kinerja Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai hasil kinerja Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Agar pembaca dapat memahami isi skripsi, maka peneliti telah menyusun skripsi sesuai dengan Peraturan Presiden Universitas Indonesia Nomor 7867/UN40/HK/2021. Struktur organisasi laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bagian ini memuat hal-hal sebagai berikut: Pendahuluan penelitian yang menjelaskan konteks penelitian. Pernyataan masalah penelitian yang mengidentifikasi masalah yang diteliti. tujuan penelitian; Manfaat penelitian; dan Struktur Organisasi Skripsi.

Bab II Kajian Pustaka. Bagian ini merupakan uraian rinci tentang topik dan masalah yang dibahas dalam penelitian. Secara umum tinjauan pustaka mencakup konsep, teori, prinsip, hukum, model, bahkan model kunci serta asal usulnya terkait dengan bidang tersebut.

Bab III Metode Penelitian. Bagian ini menjelaskan metode penelitian, mencakup perancangan alur penelitian oleh peneliti, mulai dari pendekatan yang digunakan, instrumen yang dipilih, langkah-langkah pengumpulan data, hingga metode analisis data yang diterapkan.

Bab IV Temuan dan Pembahasan. Bab ini menyajikan hasil penelitian terkait pengolahan dan analisis data dalam proses perumusan masalah. Selain itu, bab ini membahas temuan penelitian yang menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi. Bagian ini menjelaskan interpretasi dan metode analisis temuan penelitian. Selain itu, bab ini menguraikan poin-poin penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian serta menawarkan solusi berupa aplikasi atau rekomendasi terkait masalah yang diteliti.